

Peraturan Gubernur Banten No 2018
Tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
1.	Rata rata lama sekolah (Satuan: Tahun)	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.
2.	Harapan lama sekolah (Satuan: Tahun)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.	Adapun rumus untuk penghitungan HLS adalah sebagai berikut: $HLS_7 = \sum_{i=7}^n \frac{E_i}{P_i}$ Dimana: HLS = Harapan Lama Sekolah E_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah P_i = Jumlah seluruh penduduk usia i i = Usia (7, 8,...,n)
3.	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan (Satuan: %)	Proporsi penduduk Banten yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan dalam rangka UHC (Universal Health Coverage).	Alasan pemilihan indikator Untuk memetakan penduduk Banten yang mendapat Jaminan pelayanan kesehatan $= \frac{\Sigma \text{penduduk yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan}}{\Sigma \text{total penduduk Banten}} \times 100$

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
4.	Angka Kematian Bayi (AKB) (Satuan: 1/1000 KH)	Dimana: $D0-\leq 1th$ = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. $\sum \text{Lahir Hidup}$ = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	$AKB = D0-\leq 1th \sum \text{Lahir Hidup} \times 1000$
5.	Angka Kematian Ibu (AKI) (Satuan: 1/100.000 KH)	Ibu yang meninggal pada masa kehamilan, bersalin dan nifas bukan karena kecelakaan atau sakit di wilayah tertentu selama satu tahun	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar $\frac{\sum \text{ibu yang meninggal krn hamil, bersalin, nifas di suatu wilayah ttt selama 1 thn}}{\sum \text{kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100$
6.	Angka Harapan Hidup (Satuan: Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
7.	Persentase Penanganan Jumlah PMKS (Satuan: %)	Cakupan Penanganan Jumlah PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS yang mendapat Pelayanan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat
8.	Index Gini (Satuan: %)	Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi: persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi: persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama	Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0,3$ = ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi
9.	LPE Sektor Perindustrian (Satuan: %)	Menunjukkan tahap perubahan pertumbuhan ekonomi di bidang industri, persentase perekonomian suatu daerah dalam PDRB. < Kemenperin 2014>	LPE Sektor Perindustrian $Gi = \frac{PDRB_{i1} - PDRB_{i0}}{PDRB_{i0}} \times 100\%$ Keterangan : Gi = adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen. PDRB_i = PDRB Sektor Perindustrian pada tahun t PDRB_{i0} = PDRB Sektor Perindustrian tahun dasar.
10.	Tingkat Kemantapan Jalan (Satuan: %)	Persentase dari jumlah panjang jalan kewenangan Provinsi dalam keadaan kondisi pelayanan mantap (Kondisi baik atau sedang, sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu). Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011	Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi permukaan jalan dalam kondisi mantap, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dalam kondisi baik di Provinsi Banten masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang. Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Total panjang jalan provinsi}} \times 100\%$ - kondisi mantap = kondisi baik + kondisi sedang - kondisi tidak mantap = kondisi rusak berat + kondisi rusak ringan

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
11.	Persentase pemulihan dan pencegahan banjir (Satuan: %)	Cakupan luas penanganan banjir di Provinsi Banten termasuk kesiapsiagaan satgas siaga banjir Sumber: PermenPUPR 13/PRT/M/2015	Alasan Pemilihan Indikator: Di Provinsi Banten masih banyak terdapat wilayah yang mengalami banjir, perlu ada upaya penanganan banjir baik pemulihan maupun pencegahan. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas area yang telah ditangani}}{\text{Luas area rawan bencana}} \times 100\%$
12.	Pemenuhan tingkat layanan irigasi (Satuan: hektar)	Cakupan luas layanan pada jaringan irigasi kewenangan provinsi. Sumber: PermenPUPR 12/PRT/M/2015	Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak areal persawahan yang belum terlayani oleh jaringan irigasi teknis. Perlu dilakukan berbagai upaya eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas area irigasi yang terlayani}}{\text{Total luas area irigasi}} \times 100\%$
13.	Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: %)	Cakupan rumah layak huni di Provinsi Banten.	Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak rumah tidak layak huni di Provinsi Banten (tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni). Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
14.	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik (Satuan: %)	Cakupan pengelolaan gedung strategis Provinsi Banten dengan baik dan memenuhi persyaratan. Sumber: PermenPU 24/PRT/M/2008	Alasan Pemilihan Indikator: Provinsi Banten telah memiliki beberapa gedung strategis. Perlu dilaksanakan pengelolaan seperti pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah gedung strategis yang telah dikelola dengan baik}}{\text{Jumlah gedung strategis}} \times 100\%$

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																										
15.	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (Satuan: Hektar)	Cakupan luas penataan kawasan kumuh	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur luas kawasan kumuh di Provinsi Banten $\frac{Luas\ Kawasan\ Kumuh}{Luas\ Wilayah} \times 100$																										
16.	cakupan pelayanan pengelolaan sampah regional (Satuan: %)	Tersedianya fasilitas pengelolaan sampah di perkotaan	Alasan Pemilihan Indikator: Masih belum terkelolanya penangana sampah perkotaan di Provinsi Banten Formulasi Perhitungan: $\frac{Volume\ sampah\ yang\ dikelola}{Jumlah\ volume\ sampah\ perkotaan} \times 100\%$																										
17.	Indeks Demokrasi Indonesia (Satuan: %)	Capaian Poin Demokrasi Katori Baik dan Berkualitas pada Aspek Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Institusi Demokrasi	<table><tr><th>KATEGORI/KRITERIA DEMOKRASI</th><th>INDEKS KOMPOSIT</th><th colspan="2">POIN</th><th>VARIABEL</th></tr><tr><td rowspan="3">IDI (DEMOKRASI YANG BAIK DAN BERKUALITAS)</td><td>Kebebasan Sipil</td><td rowspan="3">100</td><td>10 10 10</td><td>Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan Kebebasan dari Diskriminasi</td></tr><tr><td>Hak-Hak Politik</td><td>10 10 10</td><td>Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan</td></tr><tr><td>Institusi Demokrasi</td><td>10 10 10 10</td><td>Pemilu yang Bebas dan Adil Peran DPRD dan Partai Politik Peran Birokrasi Pemerintah Peradilan yang Independen</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>POIN</td><td>KATEGORI</td><td colspan="2">ASPEK</td></tr></table>					KATEGORI/KRITERIA DEMOKRASI	INDEKS KOMPOSIT	POIN		VARIABEL	IDI (DEMOKRASI YANG BAIK DAN BERKUALITAS)	Kebebasan Sipil	100	10 10 10	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan Kebebasan dari Diskriminasi	Hak-Hak Politik	10 10 10	Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	Institusi Demokrasi	10 10 10 10	Pemilu yang Bebas dan Adil Peran DPRD dan Partai Politik Peran Birokrasi Pemerintah Peradilan yang Independen			POIN	KATEGORI	ASPEK	
KATEGORI/KRITERIA DEMOKRASI	INDEKS KOMPOSIT	POIN		VARIABEL																									
IDI (DEMOKRASI YANG BAIK DAN BERKUALITAS)	Kebebasan Sipil	100	10 10 10	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan Kebebasan dari Diskriminasi																									
	Hak-Hak Politik		10 10 10	Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan																									
	Institusi Demokrasi		10 10 10 10	Pemilu yang Bebas dan Adil Peran DPRD dan Partai Politik Peran Birokrasi Pemerintah Peradilan yang Independen																									
		POIN	KATEGORI	ASPEK																									

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan										
			<table><tr><th>INTERVAL</th><th>PERSEPSI</th><th>DEMOKRASI</th></tr><tr><td>80 - 100</td><td>BAIK BERKUALITAS</td><td rowspan="3">Kebebasan Sipil Hak-Hak Politik Institusi Demokrasi</td></tr><tr><td>60 - 79</td><td>CUKUP</td></tr><tr><td>50-59</td><td>KURANG BAIK</td></tr></table>	INTERVAL	PERSEPSI	DEMOKRASI	80 - 100	BAIK BERKUALITAS	Kebebasan Sipil Hak-Hak Politik Institusi Demokrasi	60 - 79	CUKUP	50-59	KURANG BAIK
INTERVAL	PERSEPSI	DEMOKRASI											
80 - 100	BAIK BERKUALITAS	Kebebasan Sipil Hak-Hak Politik Institusi Demokrasi											
60 - 79	CUKUP												
50-59	KURANG BAIK												
18.	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)	Prosentase penegakan peraturan perundang-undangan daerah provinsi dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Alasan Pemilihan indikator: untuk efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan tingkat provinsi dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Formulasi Perhitungan: $\frac{\sum \text{Cakupan yan trantibum, penegakan Perda, linmas dan koordinasi kebakaran}}{4}$										
19.	Indeks Resiko Bencana (Satuan: Nilai)	Bahaya (hazard) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Untuk data tentang kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan,	$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$										

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.	
20.	Angka Kriminalitas (Satuan: jumlah)	Penurunan Angka Peristiwa Kriminalitas di Provinsi Banten (ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi)	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengukur tingkat kriminalitas di Provinsi Banten $= \frac{\sum \text{Tindak kriminal yang tertangani dalam 1 tahun}}{\sum \text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$
21.	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (Satuan: Nilai)	IPK adalah alat untuk menilai proses pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan, sekaligus diagnostik dan evaluasi kondisi pembangunan ketenagakerjaan secara komprehensif dan holistik.” “Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar. Indikator Utama tersebut adalah : 1. Perencanaan tenaga kerja 2. Penduduk dan tenaga kerja	$kn = \frac{W_{un}}{\sum W_{sn}} \times 100$ Dimana : - Koefisien Indikator Utama ke-n - Bobot Indikator Utama ke-n - Bobot Sub Indikator dari Indikator Utama ke-n

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		3. Kesempatan kerja 4. Pelatihan kerja 5. Produktivitas tenaga kerja 6. Hubungan Industrial 7. Kondisi lingkungan kerja 8. Pengupahan dan kesejahteraan pekerja 9. Jaminan sosial tenaga kerja	
22.	Indeks pembangunan gender (IPG) (Satuan: Nilai)	Indeks yang mengukur ukuran tingkat pencapaian tiga indikator utama pembangunan sumber daya manusia dibidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan per kapita/pengeluaran dengan memperhitungkan ketimpangan jender (untuk mengetahui kesenjangan pembangunan antara laki – laki dan perempuan	$\frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$
23.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Satuan: Nilai)	Indeks untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan	$IDG = 1/3 (I(par) + I(DM)+I(inc-dis))$

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
24.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Satuan: %)	Kemampuan Daerah untuk memenuhi kecukupan pangan masyarakatnya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari hari	IKPRT = $100 - (H (G+(1-G) I) + 0,5 Q (1-H (G + (1-G) I))$ 100 dimana: IKPRT = Indeks Ketahanan Pangan Rumah Tangga H = head-count ratio, proporsi penduduk yang kekurangan pangan G = food-gaps, proporsi kekurangan energi/protein dengan kebutuhannya = ukuran ketimpangan dari distribusi food-gaps Q = koefisien variasi dari ketersediaan untuk konsumsi energi/protein
25.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Satuan: %)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan istilah yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air dan hutan.	IKLH Provinsi = (IPA×30%) + (IPU×30%) + (ITH×40%) Keterangan : IKLH Provinsi = indeks kualitas lingkungan tingkat provinsi IPA = indeks pencemaran air IPU = indeks pencemaran udara ITH = indeks tutupan hutan
26.	Capaian Administrasi Kependudukan (Satuan: %)	Angka yang menunjukan kepemilikan dokumen kependudukan per satuan waktu	Angka Rata-Rata kepemilikan dokumen kependudukan per satuan waktu
27.	Persentase Desa Mandiri (Satuan: %)	Indeks Pembangunan Desa (IPD) disusun untuk melihat tingkat perkembangan desa di Indonesia. Selain itu, IPD dimaksudkan sebagai instrumen:(a) perencanaan pembangunan desa di Indonesia; (b) monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan desa; dan (c)	a. Penghitungan bobot tiap indicator dalam factor dengan formula: $B = \frac{LF}{RLF} \times RSSL$ Keterangan: B = nilai bobot, LF = nilai <i>loading factor</i>, RLF = rata-rata <i>loading factor</i> dalam satu faktor, RSSL= nilai <i>rotation sums of squared loading(% of variance)</i>.

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		pengukuran pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2015–2019 di Indonesia. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara teknis, desa mandiri merupakan desa dengan nilai IPD lebih dari 75.	b. Penghitungan kontribusi tiap indicator dengan formula: $b = \frac{B}{JB}$ Keterangan: b = nilai kontribusi, B = nilai bobot, JB = jumlah semua bobot.
28.	Laju pertumbuhan penduduk (Satuan: Nilai)	Angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu	$r = \{(Pt - P0) / P0 \} \times 100$ r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah penduduk pada tahun t $P0$ = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P0 $Pt = P0 + (B - D) + (Mi - Mo)$ Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t $P0$ = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t Mo = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
29.	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (Satuan: %)	Perhitungan terhadap penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya	Alasan Pemilihan Indikator: masih tingginya angka kecelakaan di Provinsi Banten membutuhkan berbagai upaya untuk mengurangi angka kecelakaan tersebut. Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah kecelakaan tahun } n}{\text{Jumlah kecelakaan tahun } n - 1} \times 100\%$
30.	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi (Satuan: %)	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang merupakan kewenangan provinsi	Alasan Pemilihan Indikator: sebagai upaya pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran transportasi dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.. Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan}} \times 100\%$
31.	Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten (Satuan: Nilai)	E-Government (e-Gov) merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat.	Alasan Pemilihan Indikator: Masih diperlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan dengan perkembangan teknologi dapat menggunakan pelayanan secara elektronik. Formulasi Perhitungan: $\sum \frac{\text{Masyarakat yang terlayani e-Gov}}{\text{Permohonan Pelayanan e-Gov}} \times 100 \%$
32.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Satuan: %)	Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas	Alasan Pemilihan Indikator: Masih perlunya peningkatan keterbukaan informasi publik dari perangkat daerah di Provinsi Banten. Formulasi Perhitungan: $\sum \frac{\text{Perangkat Daerah yang membuka akses atas informasi publik}}{\text{Perangkat Daerah}} \times 100 \%$

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
33.	Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan Omset Koperasi (Satuan: %)	Peningkatan persentasi koperasi aktif, Bankable dan Implementasi Penerapan Pelatihan Koperasi yang dibina	persentasi koperasi aktif, Bankable dan Implementasi Penerapan Pelatihan Koperasi yang dibina $\frac{\text{Koperasi aktif, Bankable dan Implementasi Penerapan Pelatihan Koperasi}}{\text{Jumlah koperasi yang di bina}}$
34.	Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil (Satuan: %)	Persentase Peningkatan Omset, aset dan implementasi hasil pelatihan Usaha Kecil terhadap Jumlah Usaha Kecil yang dibina	Persentase Omset, aset dan implementasi hasil pelatihan Usaha Kecil terhadap Jumlah Usaha Kecil yang dibina $\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang menjadi usaha menengah}}{\text{Jumlah Usaha kecil yang di bina}}$
35.	Jumlah Nilai Investasi (Satuan: triliyun)	Jumlah realisasi PMDN dan realisasi PMA. Tujuannya untuk menghitung realisasi penanaman modal (PMDN + PMA).	Rumus Perhitungan: Jumlah Realiasi PMA + Realisasi PMDN
36.	Indeks Kepuasan Pelayanan Investor (Satuan: %)	Penilaian atas kualitas layanan DPMPTSP dari aspek publik yang menggunakan layanannya. Tujuannya untuk melihat tingkat kualitas layanan DPMPTSP kepada publik, semakin tinggi nilai IKM, semakin baik, artinya semakin banyak masyarakat yang merasakan profesionalitas DPMPTSP	Rumus Perhitungan: $\frac{\sum \text{Jumlah masyarakat yang menilai kinerja DPMPTSP baik}}{\sum \text{masyarakat yang menggunakan layanan DPMPTSP}} \times 100$

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
37.	Indeks Pembangunan Kepemudaan (Satuan: Nilai)	Untuk mengidentifikasi dalam pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan	Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur jumlah potensi dalam pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan. $Pemuda mandiri = \frac{Pemuda yang berkarakter Produktif}{Pemuda yang berdaya saing}$
38.	Indeks Pembangunan Olahraga (Satuan: Nilai)	Untuk mengidentifikasi dalam peningkatan olahraga prestasi, pemberdayaan, pembinaan dan pelatihan olahraga.	Alasan pemilihan indikator: untuk mengukur jumlah atlet berprestasi pada tingkat nasional dan internasional $Prestasi (Olahraga Prestasi) = \frac{Siswa Berolahraga (Olahraga Pendidikan)}{Olahraga Masyarakat (Pemasalan dan Pembudayaan)}$
39.	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah (Satuan: %)	mengukur keberlanjutan pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah di Provinsi Banten	Alasan pemilihan indikator: mengukur keberlanjutan pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah di Provinsi Banten $\frac{\Sigma inovasi budaya yang dilestarikan}{\Sigma budaya daerah yang ada}$
40.	Persentase peningkatan minat baca masyarakat (Satuan: %)	Meningkatnya sikap positif dan ketertarikan masyarakat terhadap aktifitas membaca melalui indikator : frekuensi membaca per minggu, lama membaca perhari, dan banyak buku yang ditamatkan dalam 1 (satu) tahun.	Minat baca = $\frac{\Sigma rata2 \text{ tiap indikator minat baca}}{3}$ Skoring minat baca: - Sangat rendah (skor ≤ 20) - Rendah (skor 20,1 – 40) - Sedang (skor 40,1 – 60) - Tinggi (skor 60,1 – 80) - Sangat tinggi (skor 80,1 – 100)

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
41.	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Katentuan Kearsipan (Satuan: %)	Tersedianya record centre di OPD Provinsi Banten	$\% \text{ OPD} = \frac{\sum \text{OPD yang memiliki record center}}{\sum \text{Total OPD}} \times 100$
42.	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Satuan: %)	Proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun	Laju pertumbuhan sektor perikanan terhadap PDRB dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan (Sukirno, 2007): $G = \frac{\text{PDRB}_1 - \text{PDRB}_0}{\text{PDRB}_0} \times 100\%$ G = Laju pertumbuhan PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya
43.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (Satuan: %)	Persentase peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam hal ini adalah sektor akomodasi makan dan diminum baik dalam PDRB ADHK. Indikator ini digunakan untuk mengukur perubahan kontribusi sektor akomodasi makan dan diminum pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Namun peningkata LPE sektor pariwisata (akomodasi makan	(Kontribusi sektor akomodasi makan dan diminum dalam PDRB ADHK tahun n) dikurangi (Kontribusi sektor akomodasi makan dan diminum PDRB ADHK tahun n-1) di bagi (PDRB Kontribusi sektor akomodasi makan dan diminum ADHK tahun n-1)

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		dan minum ini) tidak sepenuhnya menunjukkan kinerja sektor ini sesungguhnya, sebab peningkatan kontribusi dapat disebabkan oleh kinerja sektor akomodasi makan dan minum yang meningkat atau sektor diluar sektor akomodasi makan dan minum kontribusinya yang menurun. Sehingga untuk membuktikan kinerja sektor pariwisata yang meningkat perlu didukung oleh indikator kinerja kunci seperti jumlah kunjungan wisatawan	
43.	Pertumbuhan Sektor Pertanian (Satuan: %)	Proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun	Laju pertumbuhan sektor perikanan terhadap PDRB dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan (Sukirno, 2007): $G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$ G = Laju pertumbuhan PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
44.	Rasio Cakupan Tutupan Hutan (Satuan: %)	Perbandingan Luas Kawasan Hutan ditambah dengan Tutupan Hutan diluar Kawasan Hutan yang memiliki kerapatan (vegetasi) diatas 50% dibagi Luas Provinsi Banten	$\text{Rasio Tutupan Hutan} = \frac{KH + TH \text{ diluar KH}}{\text{Luas Provinsi}} \times 100\%$ Keterangan: KH = Kawasan Hutan TH = Tutupan Hutan Catatan : 1. Identifikasi kerapatan vegetasi menggunakan metode/Teknik NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) dari Citra Landsat 8 Tahun 2016 2. Luas Provinsi Banten menggunakan sumber data dari BPS/Banten dalam angka
45.	Rasio elektrifikasi (Satuan: %)	Rasio elektrifikasi adalah tingkat perbandingan jumlah penduduk yang telah mendapat listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau Negara	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah penduduk di Provinsi Banten yang telah terlayani aliran listrik. Formulasi Perhitungan: $\frac{\Sigma \text{penduduk yang telah mendapat listrik}}{\Sigma \text{Penduduk Provinsi Banten}} \times 100\%$
46.	Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral (Satuan: %)	Perhitungan terhadap pertumbuhan sektor-sektor dibidang sumber daya mineral.	Alasan Pemilihan Indikator: masih tingginya angka kecelakaan di Provinsi Banten membutuhkan berbagai upaya untuk mengurangi angka kecelakaan tersebut. Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah PDRB dibidang SDM tahun } n}{\text{Jumlah PDRB dibidang SDM tahun } n - 1} \times 100\%$

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan												
47.	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting (Satuan: %)	Tingkat inflasi menunjukkan persentase tingkat harga rata-rata tertimbang untuk barang pokok (beras, rokok, gula, jagung kedelai, minyak goreng, daging beku, bawang merah) dan bahan galian strategis (aspalt, bijih besi, minyak bumi dan bahan tambang) < Bregman EM , Feses EJ . 2003>	Tingkat inflasi $Laju\ Inflasi = \frac{IHK_n - IHK_0}{IHK_0} \times 100\%$ Keterangan: IHK_n = Indeks Harga Konsumen pada tahun n IHK₀ = Indeks Harga Konsumen pada tahun 0												
48.	LPE Sektor Perdagangan (Satuan: %)	Menunjukkan tahap perubahan pertumbuhan ekonomi di bidang perdagangan, persentase perekonomian suatu daerah dalam PDRB. < David , FR .2014 .Strategi Management >	LPE sektor perdagangan $Gi = \frac{PDRB_{i1} - PDRB_{i0}}{PDRB_{i0}} \times 100\%$ Keterangan : G = adalah tingkat pertumbuhan sektor Perdagangan yang dinyatakan dalam persen. PDRB i_t = PDRB Sektor Perdagangan pada tahun t PDRB ₀ = pendapatan daerah pada tahun dasar.												
49.	Capaian Pelayanan Publik (Satuan: %)	Kepuasan pelayanan badan penghubung Sbg wakil dari pemerintah daerah terhadap lembaga dan masyarakat,	1) Indikator: jumlah lembaga yang dilayani dibagi jml lembaga : $= \frac{\Sigma \text{lembaga yang dilayani}}{\Sigma \text{lembaga}} \times 100\%$ 2) Capaian Masyarakat yang dilayani (Orang) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th><th>Jumlah Masyarakat yang dilayani (Orang)</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>>1000</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr> <tr> <td>2</td><td>501-999</td><td>B</td><td>Baik</td></tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Jumlah Masyarakat yang dilayani (Orang)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	>1000	A	Sangat Baik	2	501-999	B	Baik
Nilai Persepsi	Jumlah Masyarakat yang dilayani (Orang)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan												
1	>1000	A	Sangat Baik												
2	501-999	B	Baik												

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan			
			3	<500	C	Cukup
50.	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Satuan: Nilai)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN			
			KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN
			1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja
			2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran
			3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja
			4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi
			5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya
			TOTAL	100		
51.	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD (Satuan: %)	Capaian Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD pada tahun berkenaan	Alasan pemilihan indikator: mengukur capaian pelayanan penunjang pelaksanaan kinerja DPRD			
			$\frac{\text{Capaian program kerja DPRD yang dilaksanakan}}{\text{Target program kerja DPRD yang ditetapkan}} \times 100$			

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	
52.	Capaian Maturitas SPIP (Satuan: Nilai)	Untuk menentukan kualitas dalam konteks maturitas sistem pengendalian internal pemerintahan	Level	Keterangan
			1 (belum ada)	Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian internal
			2 (Rintisan)	Praktik pengendalian internal bersifat <i>ad hoc</i> dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan
			3 (Berkembang)	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektifitasnya
			4 (Terdefinisi)	Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai
			5 (Terkelola dan Terukur)	Pengendalian internal diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi
			6 (Optimum)	Pengendalian internal diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis
53.	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah (Satuan: Peringkat)	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan (RKPD) dengan parameter penilaian Pangripta	$\frac{\sum \text{dokumen perencanaan daerah yang disusun}}{\sum \text{dokumen perencanaan yang sesuai dgn parameter penilaian Pangripta}} \times 100$	
54.	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%) (Satuan: %)	Capaian Pendapatan Asli Daerah dibandingkan pendapatan daerah	Alasan pemilihan indikator: untuk mengetahui pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah $= \frac{\sum \text{pendapatan asli daerah}}{\sum \text{pendapatan daerah}} \times 100$	

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan											
55.	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Satuan: Opini)	merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern	<table><tr><th>Level</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>)</td></tr><tr><td>2</td><td>Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>)</td></tr><tr><td>3</td><td>Tidak Wajar (<i>Adverse Opinion</i>)</td></tr><tr><td>4</td><td>Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)</td></tr></table>	Level	Keterangan	1	Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>)	2	Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>)	3	Tidak Wajar (<i>Adverse Opinion</i>)	4	Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)	
Level	Keterangan													
1	Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>)													
2	Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>)													
3	Tidak Wajar (<i>Adverse Opinion</i>)													
4	Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)													
56.	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (Satuan: %)	Pencapaian kinerja dan kedisiplinan ASN Pemprov Banten yang di ukur melalui pencapaian kinerja yang berkategori baik ASN pada setiap bulan di imbangi/sinergi dengan ketentuan terhadap peraturan yang berlaku	Indeks Profesionalisme = $\frac{Jumlah\ ASN\ yang\ berkinerja\ dan\ berdisiplin\ baik}{Jumlah\ ASN\ Prov\ Banten} \times 100$											
57.	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN (Satuan: Nilai)	Kemampuan kerja setiap ASN yang mencakup aspek <i>skill</i> , <i>knowledge</i> dan <i>attitude</i> yang dibuktikan dari sertifikat kelulusan mengikuti kegiatan Pengembangan SDM Aparatur (kegiatan pendidikan dan pelatihan)	Indeks Kompetensi = $\frac{Jumlah\ peserta\ Diklat\ Dengan\ Kategori\ Lulus}{Jumlah\ ASN\ Prov\ Banten} \times 100$											

NO	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
58.	Cakupan Penelitian dan pengembangan (Satuan: %)	Capaian penelitian yang dihasilkan dan dimanfaatkan	Alasan pemilihan indikator: mengukur kemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam rangka evidence based policy $\frac{\Sigma \text{Hasil penelitian yang dimanfaatkan}}{\Sigma \text{Hasil penelitian yang dilaksanakan}} \times 100$